

**KEPENTINGAN MESIR MENOLAK MERAATIFIKASI KESEPAKATAN
COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT (CFA) MENGENAI ATURAN
PENGELOLAAN SUNGAI NIL**

Oleh: Ariski Aznor¹

Email : Arisky.aznor@gmail.com

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.Ip,M.Si

Bibliografi :3 Buku, 7 jurnal, 1 Laporan Tahunan, 9 Media Massa dan Situs Internet

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This research describe about Egypt's Interest to refused to ratify Cooperation Framework Agreement (CFA) about the rule of Management in Nile River. Nile River is Longest river in africa. And Shared by eleven countries. Nile River is primary water source of Egypt. Before CFA Exist, there was a Nile river agreement signed by British Colonial and Egypt in 1929. This agreement ensured that Egypt would maintain its historic right of the Nile's water, and allocated all water from the Nile to Egypt with no diversion allowed by upstream riparians. In 1959, Egypt and Sudan renegotiated their Nile sharing agreement Sudan recognized historical "rights over Nile River for Egypt and maintain their monopoly over the waters of the Nile, the 1959 treaty does not include any of the remaining upstream riparian countries and it forbids them from using the water or constructing any obstructions in Nile River. In 1999 First Organisation Nile riparian Countries, Nile Basin Initiative (NBI) Was Formed By 9 Nile Riparian Countries. The main objective of the NBI was formed a cooperative framework agreement the Nile riparians countries and replace 1929 and 1959 agreement. Unfortunately Egypt and Sudan Refused to ratify CFA Agreement.

The theory that applied in this research is Realism and Level analysis in this research is State Level Analysis, researcher also use theory from about National Interest.

The study found that the reason Egypt refused to ratify CFA Agreement are first, Egypt is downstream Nile riparians and has hot desert climate so Egypt depend on Nile River. Egypt Worry that CFA Agreement will allow upstream Nile riparian to diversion and build construction Nile and will impact to Nile River in Egypt. Second CFA don't recognize Egypt's historical right over Nile River and contradict Egypt's constitution. Third Egypt's Economy depends on Nile river so Egypt Worry that CFA Agreement will allow upstream Nile riparian to diversion and build construction Nile and will impact to Egypt's Economy. Fourth, Nile River Issue is Security issue for Egypt. Almost all Egyptian citizen depend on Nile River, Egypt worry CFA agreement will impact to almost all Egyptian citizen.

Keywords : Nile River, Nile Basin Initiative, CFA, National Interest, Egypt

¹¹ Mahasiswa Jurusan Hubungan internasional angkatan 2011 Universitas Riau

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai kepentingan Mesir dalam menolak meratifikasi kesepakatan *Cooperative Framework Agreement (CFA)* atau dikenal dengan *Entebbe Agreement* terkait pengaturan pengelolaan sungai nil.

Sungai Nil adalah sungai terpanjang di Afrika sekaligus salah satu sungai terpanjang di dunia. Sungai nil memiliki panjang 6700 KM dan melintasi 10 negara yaitu Burundi, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, dan Republik Demokrasi Kongo.² Sungai nil menjadi sangat vital terutama bagi negara Mesir. Selain karena menjadi sumber air utama bagi penduduk Mesir dan juga nilai historis karena Sungai nil merupakan tempat peradaban Mesir kuno yang merupakan peradaban tertua di dunia. Herodotus sejarawan di masa Yunani kuno pernah berkata “Mesir merupakan hadiah dari Sungai Nil”. sungai nil tidak hanya berarti bagi mesir saja namun pada negara lainnya yang berada di hulu sungai nil yang mulai memanfaatkan sungai nil tersebut untuk kepentingan negara masing-masing. Namun dengan banyaknya negara yang dilalui oleh sungai nil, terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan yang menjadikan sungai nil sebagai sumber potensial konflik. Untuk menghindari terjadinya konflik tersebut, dibuatlah suatu perjanjian atau persetujuan mengenai pengaturan dan hak-hak negara dalam memanfaatkan sungai nil sehingga

diharapkan tidak ada lagi konflik terkait sungai nil.

Kondisi geografis dan iklim di Mesir adalah gurun yang tandus dan iklim gurun yang memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Hal ini membuat Mesir sangat bergantung pada Sungai Nil. 96% persediaan air di Mesir berasal dari Sungai Nil. Air Sungai Nil dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik pertanian bahkan untuk kebutuhan rumah tangga. Mayoritas penduduk Mesir berada di lembah Sungai Nil sehingga kota-kota besar termasuk ibukota Mesir Kairo berada di lembah Sungai Nil. Meskipun demikian, Mesir berada di posisi sulit hal ini dikarenakan Mesir berada di hilir Sungai Nil dan sumber Air Sungai Nil yang mengalir ke Mesir berada di luar teritorial negara Mesir. Dengan ketergantungan tersebut Mesir menjadikan Sungai Nil sebagai prioritas kebijakan luar negeri untuk menjamin agar Sungai Nil tetap mengalir hingga ke Mesir.

Traktat pertama diprakarsai oleh Inggris pada masa kolonial di abad ke 19. Inggris berhasil mencaplok mesir dari tangan Kesultanan Ottoman. Selain itu Inggris juga berhasil menjajah beberapa wilayah Afrika Timur yang dilalui Sungai Nil seperti Sudan, Tanzania, Uganda dll. Inggris berniat untuk menjadikan sungai nil sebagai sumber irigasi bagi kegiatan perkebunan terutama perkebunan kapas di Mesir.³ Inggris membuat traktat untuk menjaga kepentingannya di Sungai Nil dan mencegah negara lain untuk merumuskan kebijakan yang akan mengancam suplai air sungai nil di mesir. Inggris mengadakan

² Nile Basin Initiative. State Of The River Nile Basin. 2012
(www.cedare.ifl.gov/State%20of%20the%20Nile%20Basin) diakses tanggal 17 oktober 2014 pukul 15:04

³ Elimam, L., Rheinheimer, D., Connell, C., and Madani, K. A Game Theory Approach Understanding The Nile River Basin Conflict dalam . Babcock, Jr., R. and Walton, R. (ed). World Environmental and Water Resources Congress (2008) 1-10 halaman 3.

perjanjian dengan Italia untuk menyepakati garis pemisah antara jajahan Inggris dan Italia di Afrika Timur dan upaya agar Italia tidak membangun irigasi dan infrastruktur sungai nil di Ethiopia yang akan mengancam debit air sungai nil di Mesir.⁴ berikutnya tahun 1906 Inggris dan *Congo Free State* yang saat itu dibawah pengaruh Belgia menyepakati untuk tidak membangun infrastruktur irigasi yang akan mengancam debit air sungai nil di sudan.⁵ Di tahun yang sama Inggris mengadakan perjanjian dengan Prancis dan Italia dan Inggris kembali mengadakan perjanjian tahun 1925 dengan Italia dimana isi perjanjian tersebut Italia menjamin aliran hulu Sungai Nil di Ethiopia menuju ke Mesir.⁶ Patut digaris bawahi bahwa sumber aliran sungai nil di Mesir berasal dari Sungai nil yang berada di Ethiopia

Pada tahun 1929, Mesir yang sudah memperoleh kemerdekaan dari Inggris menandatangani perjanjian dengan Inggris yang menjajah daerah hulu Sungai nil (meliputi negara Sudan, Tanzania, Uganda dan Kenya).⁷ Poin perjanjian tersebut adalah:⁸

1. Inggris menjamin tidak ada akan ada proyek di sungai nil yang akan mengancam kepentingan Mesir terhadap Sungai nil.
2. Setiap bendungan yang dibangun di Sungai Nil harus mendapat izin dahulu dari Mesir.

Perjanjian yang dibuat Inggris dan Mesir tahun 1929 dianggap tidak

⁴ Ashok Swain. Ethiopia, the Sudan, and Egypt: The Nile River Dispute. *Journal of Modern African Studies* vol 53 no 4 (1997) 675-694 Halaman 676.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷ Elimam, L., Rheinheimer, D., Connell, C., and Madani, K. *Op.cit.*, halaman 99

⁸ Patrick Loch Otieno Lumumba. *The interpretation of the 1929 Treaty and its legal relevance and implication for the stability of the region*

(www.codesria.org/IMG/pdf/03_Lumumba.pdf) halaman 13. Pukul 19:10

menguntungkan Sudan yang sudah merdeka tahun 1952. Tahun 1959 Sudan dan Republik Arab Bersatu⁹ menyepakati perjanjian baru yang menggantikan perjanjian 1929 yang disepakati oleh Mesir dan Inggris. Perjanjian tersebut membuat Mesir memperoleh debit air di sungai nil berjumlah 55,5 milyar kubik dan Sudan memperoleh 18,5 milyar kubik.¹⁰ Jumlah perolehan debit air sungai nil tersebut meliputi 99% dari total debit air di seluruh Sungai nil.¹¹ Dengan kata lain perjanjian tersebut praktis membuat Mesir dan Sudan memegang monopoli di seluruh Sungai Nil. Perjanjian saat itu tidak mengikutsertakan negara di hulu sungai nil karena masih dibawah penjajahan bangsa Eropa.¹² Perjanjian tersebut tidak diakui oleh Ethiopia yang tidak diikutsertakan dalam perjanjian dan Ethiopia bersikukuh bahwa Ethiopia memiliki hak memanfaatkan sungai nil di wilayahnya untuk kesejahteraan rakyat Ethiopia.¹³ Perjanjian tersebut juga membuat rakyat beberapa negara Afrika Timur yang dilalui sungai nil memprotes perjanjian yang dibuat Mesir dan Sudan tersebut.¹⁴

Mesir khawatir dengan Ethiopia yang berencana akan membangun bendungan atau irigasi sehingga hal

⁹ Republik Arab Bersatu merupakan negara gabungan antara Mesir dan Syria yang dibentuk oleh Gammal Abdul Nasser tahun 1959 dengan ibukota Kairo. Republik ini dibubarkan tahun 1961.

¹⁰ Elimam, L., Rheinheimer, D., Connell, C., and Madani, K. *loc.cit.*

¹¹ Andrew Carlson. *Who Own The Nile ? Egypt, Sudan And Ethiopia Changin Dam*. 29 september 2013 (<http://origins.osu.edu/article/who-owns-nile-egypt-sudan-and-ethiopia-s-history-changing-dam>) diakses tanggal 17 oktober 2013. Pukul 19:20

¹² Meliputi negara Tanzania yang merdeka tahun 1961, Uganda merdeka tahun 1962, Rwanda merdeka tahun 1962, Burundi merdeka tahun 1962, dan Kenya merdeka tahun 1963.

¹³ Peter Kagwanja. Calming The Waters : The East African Community Conflict Over The Nile Resources. *Journal Of Eastern African Studies*. Vol 1 Iss 3 (1997) (321-337) halaman 324.

¹⁴ Ashok Swain *op.cit.*, halaman 681

tersebut akan mengancam debit air Sungai Nil di Mesir. Mesir meresponnya dengan mendukung gerakan separatis Eritrea pada perang Eritrea-Ethiopia, mendukung separatisme Ogaden dan juga mendukung Somalia pada perang Ogaden antara Ethiopia-Somalia.¹⁵ Mesir bersikukuh bahwa sungai Nil merupakan Sungai Mesir juga mengancam dengan kekuatan militer pada negara lain yang “menggangu” Sungai Nil.¹⁶

Tahun 1999 dibentuklah suatu organisasi kerja sama antara negara yang dialiri sungai Nil yang dikenal dengan *Nile Basin Initiative* (NBI) dimana Mesir adalah salah satu anggotanya beserta 9 negara lainnya. Pada forum tersebut Mesir melalui menteri sumber daya air Mahmoud Abu Zeid membuat pernyataan tahun 2004 bahwa Mesir akan menerima semua keputusan di dalam NBI.¹⁷ Tahun 2010 melalui NBI dibentuklah kesepakatan *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* (CFA) atau biasa dikenal dengan *Entebbe Agreement* mengenai Redistribusi serta manajemen di Sungai Nil di Entebbe, Uganda. negara seperti Rwanda, Tanzania, Uganda, Ethiopia menandatangani perjanjian tersebut¹⁸. berikutnya Burundi pada tahun 2011, Sudan selatan pada tahun 2013 dan Kenya tahun 2014 meratifikasi perjanjian tersebut.¹⁹ Sedangkan Mesir sendiri

menolak untuk meratifikasi konvensi tersebut.²⁰

Kerangka Teori

Penerapan teori digunakan dengan menggunakan paradigma, teori dan tingkat analisa untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut yaitu kepentingan Mesir menolak meratifikasi konvensi CFA.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan perspektif realisme karena aktor utama dalam realisme adalah negara. karena sistem internasional yang bersifat anarkis dimana tidak ada otoritas tertinggi selain negara, maka tiap negara pun berlomba-lomba dan berkompetisi untuk mempertahankan dan memperoleh kepentingan nasionalnya sehingga hubungan internasional menurut paradigma realisme bersifat konfliktual.

Pandangan realisme mengenai kerja sama hanya bersifat jangka pendek selama kerja sama tersebut sesuai dengan apa yang diperoleh negara tersebut. seluruh kesepakatan yang dihasilkan dari interaksi antar negara hanya bersifat sementara. Hal ini menjadikan setiap perjanjian, persetujuan, konvensi aturan hanya berupa aturan yang dapat disampingkan jika bertentangan dengan kepentingan nasional.²¹ Tidak ada kewajiban moral suatu negara untuk patuh terhadap perjanjian ataupun hukum lainnya. Paradigma realisme juga memandang sinis atas kerja sama ataupun kesepakatan. Suatu negara menolak suatu kesepakatan atau perjanjian karena khawatir terhadap perolehan relatif (*relative gain*) dalam suatu kesepakatan atau perjanjian dimana suatu negara

¹⁵ Andrew Carlson. *Op.cit.*,

¹⁶ Terje Tvedt. *The River Nile In The Post Colonial Age*. (London : I.B Tauris 2010) halaman 7

¹⁷ Peter Kagwanja. *Op.cot.*, halaman 332

¹⁸ *East Africa seeks more Nile water from Egypt*. 14 mei 2010

(news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8682387.stm) diakses tanggal 24 oktober 2014 pukul. 20:37

¹⁹ *Kenya to ratify Entebbe Agreement, Egypt experts express fear*. 20 maret 2014

(http://thecairopost.com/news/103055/inside_egypt/kenya-to-ratify-entebbe-agreement-egypt-experts-express-fear) diakses tanggal 24 oktober 2014. Pukul 20:39

²⁰ *Entebbe Agreement not binding on Egypt: Minister of irrigation*. 16 Juni 2013.

(<http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/74134/Egypt/Politics-/Entebbe-Agreement-not-binding-on-Egypt-Minister-of.aspx>) diakses tanggal 24 oktober 2014 pukul 20:43

²¹ Robert Jackson & George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta : Pustaka Belajar 1999) halaman 94

memperoleh keuntungan dari suatu perjanjian atau kesepakatan namun di sisi lain merugikan bagi negara lainnya.²²

Penelitian ini berfokus pada kepentingan Mesir menolak meratifikasi *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* (CFA) atau *Entebbe Agreement* sehingga menggunakan level analisis negara. Analisis ini menekankan bahwa semua pembuat keputusan akan mengeluarkan kebijakan yang sama terlepas orang atau individu yang membuatnya. Pada kasus ini, meski Mesir terjadi pergantian kepemimpinan akibat kekisruhan politik pasca revolusi tahun 2011, peneliti melihat bahwa keputusan yang diambil tiap pemimpin pun sama dan tidak berubah dimana ketiganya baik Mubarak, Morsi, dan Al Sisi tetap bersikukuh menolak meratifikasi konvensi CFA tersebut.

Dari paradigma realisme, Peneliti menggunakan konsep realisme yaitu konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional menjelaskan perilaku suatu negara. Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang paling dominan dalam politik internasional.

Morgenthau menyarankan suatu negara harus mendahului kepentingan nasionalnya daripada kepentingan regional. Kerja sama atau suatu kesepakatan yang dianggap bermanfaat harus dilandasi oleh perolehan keuntungan dan keamanan timbal balik negara-negara yang ikut serta, bukan atas dasar ideologis dan moral.²³

Pembahasan

Arti penting Sungai Nil bagi Mesir

²² Yessi Olivia. Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Transnasional* 5 (1) (2013) 890-907 halaman 897

²³ Mochtar Mas' oed. *op.cit.*, halaman 166

Menurut data Kementerian Irigasi Dan Sumber Air, Sungai Nil memasok 95% dari total sumber air.²⁴ Seperti yang dibahas sebelumnya kondisi geografis Mesir yang beriklim gurun dengan curah hujan yang paling sedikit menyebabkan Mesir adalah negara yang paling tandus jika dibandingkan dengan negara tepi Sungai Nil lainnya. Sedangkan sumber air Sungai Nil sendiri berada

Penduduk Mesir sebagian besar terkonsentrasi berada tepi Sungai Nil dimana 85% warga Mesir bermukim di tepi Sungai Nil meski tepi Sungai Nil hanya mencakup 30% dari total luas negara Mesir. dengan ini presentase penduduk Mesir yang berada di tepi Sungai Nil adalah yang paling terbesar jika dibandingkan dengan negara tepi Sungai Nil lainnya.²⁵

Tabel Populasi penduduk di Lembah Sungai Nil

Negara	Cakupan Populasi di Tepi Sungai Nil di negara (%)
Burundi	58
Eritrea	30
Ethiopia	35
Kenya	32
Kongo	4
Mesir	85
Rwanda	72
Tanzania	16
Sudan*	74
Uganda	75

*Termasuk Sudan Selatan

Sumber : Karyabwite, Diana Rizzolio, *Water Sharing in the Nile River Valley*

²⁴ Hamdy A. Hassan dan Ahmad Al Rasheedy. The Nile River and Egyptian Foreign Policy Interests. *African Sociological Review*. Vol 11 no 1 (2007) (25-37) halaman 26.

²⁵ *Ibid.*, halaman 27

(Geneva: UNEP/DEWA/GRID, Januari-Juni 2000),

Mesir khawatir akan terjadinya kekurangan sumber daya air dengan bertambah padatnya populasi dan pembangunan proyek Sungai Nil. Selain dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, Sungai Nil juga dijadikan sebagai sumber irigasi, transportasi dan pariwisata. Populasi yang berada di Sungai Nil akan bertambah 200 juta pada tahun 2015 di Negara Mesir, Ethiopia dan Sudan. Dengan kata lain permintaan akan bertambah pula seiring bertambah

Kondisi geografis Mesir membuat Mesir berada di posisi yang rentan. Sumber Sungai Nil di Mesir berada di luar wilayah teritorial Mesir sehingga untuk mengamankan kepentingan Mesir di Sungai Nil, maka Mesir harus berkoordinasi dengan pemerintah negara lain. Selain faktor geografis, kondisi iklim juga membuat Mesir berada di posisi sulit. Mesir adalah negara tepi sungai Nil yang memiliki curah hujan yang sangat sedikit bahkan paling sedikit jika dibandingkan dengan negara tepi Sungai Nil lainnya. dengan kata lain Sungai Nil memiliki peran yang sangat besar dan menjadi urat nadi kehidupan warga Mesir dari sejak zaman Mesir kuno hingga masa Mesir modern. Ada beberapa manfaat Sungai Nil bagi Mesir antara lain :

1. Sumber air Untuk kebutuhan rumah tangga.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Mesir adalah negara yang tandus dan sumber air utamanya dari Sungai Nil termasuk untuk kebutuhan dasar warga Mesir terhadap Air. Air di Sungai Nil diolah untuk kebutuhan rumah tangga misalnya untuk mencuci, mandi bahkan untuk air minum. 97% sumber air untuk kebutuhan rumah tangga Mesir berasal dari Sungai Nil. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab penduduk Mesir bermukim di sekitar

Sungai Nil. Pertumbuhan penduduk Mesir begitu pesat dari 22 juta pada tahun 1950 ke 85 juta pada tahun 2010. Diperkirakan penduduk Mesir akan mencapai 120-150 juta pada tahun 20150. Dengan demikian, Mesir sendiri diramalkan akan mengalami kelangkaan air pada seiring bertambahnya penduduk Mesir yang diramalkan hanya memiliki persediaan 500 m³/tahun yang mana dibawah standar minimum PBB yaitu 1000m³/tahun.²⁶

2. Air Untuk Irigasi Pertanian.

Selain sebagai sumber untuk kebutuhan rumah tangga, air di Sungai Nil juga merupakan sumber pengairan pertanian dan perkebunan di Mesir dimana lebih dari 80% persediaan air Mesir di Sungai Nil digunakan buat pengairan pertanian di Mesir.²⁷

Mesir yang memiliki daerah curah hujan yang paling sedikit memaksa penduduk Mesir untuk mengairi lahan mereka. Diantara negara Tepi Sungai Nil, Mesir adalah negara yang memiliki tanah pertanian di lembah Sungai Nil yang paling luas jika dibandingkan dengan negara tepi Sungai Nil lainnya. negara negara tepi Sungai Nil lainnya seperti Rwanda, Kenya, Kongo dan negara lainnya tidak begitu memanfaatkan Sungai Nil sebagai irigasi. Hal ini karena negara-negara tersebut memiliki daerah curah hujan yang tinggi.

Tabel Luas Lahan Pertanian di Negara lembah Sungai Nil

Nama Negara	Lahan Pertanian di Lembah Sungai Nil/Total lahan Pertanian (1000 ha)
Burundi	0/74
Ethiopia	23/190
Eritrea	15/22
Kenya	6/67
R.D Kongo	0/11

²⁶ Ministry of Water Resources and Irrigation Egypt. *Water Scarcity*. ([www.mfa.gov.eg/SiteCollectionDocuments/Egypt %20Water%20Resources%20Paper_2014.pdf](http://www.mfa.gov.eg/SiteCollectionDocuments/Egypt%20Water%20Resources%20Paper_2014.pdf)) diakses tanggal 28 maret 2015.

²⁷ *Ibid.*,

Mesir	3078/3300
Rwanda	2/4
Sudan*	1935/1990
Tanzania	10/155
Uganda	9/9

*termasuk Sudan Selatan

Sumber : Simon.A mason. *From Conflict to Cooperation in the Nile Basin* (Zurich: Swiss Federal Institute of Technology, 2004) halaman 160

Faktor utama pertanian Mesir menggunakan Sungai Nil sebagai irigasi adalah faktor iklim di Mesir dimana Mesir adalah negara beriklim gurun dan memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Sehingga hal ini membuat Sungai Nil menjadi sumber utama irigasi pertanian Mesir. Penggunaan Sungai Nil sebagai sumber irigasi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno. Sungai Nil memberikan tanah subur pada Mesir sehingga Mesir kuno menjadi negeri yang makmur bahkan mencapai tingkat peradaban tertinggi. Pada masa kolonial Inggris, Inggris memanfaatkan lembah Sungai Nil sebagai perkebunan kapas dikarenakan kapas merupakan komoditas ekspor yang bernilai tinggi saat itu.

Hasil dari pertanian di Mesir selain untuk menghasilkan komoditas ekspor dan bahan mentah untuk keperluan industri juga diutamakan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri sehingga pertanian di Mesir berpengaruh pada ketahanan pangan di Mesir. Ketahanan pangan merupakan kunci dari stabilitas politik dan ekonomi suatu negara tidak terkecuali Mesir. Sehingga Mesir akan menjadi Sungai Nil sebagai salah satu prioritas keamanan yaitu agar Sungai Nil terus mengalir hingga Mesir karena menyangkut hidup warga Mesir sendiri. Pertanian Mesir juga menghasilkan yang menjadi komoditas ekspor sehingga dari pertanian Mesir juga menyumbang 17% dari total *Gross Domestic Product* (GDP) atau pendapatan nasional Mesir dan 23% warga

Mesir bekerja di sektor pertanian di lembah Sungai Nil.²⁸

3. Sumber Energi listrik

Sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan irigasi untuk kegiatan pertanian, Air Sungai Nil di Mesir juga dijadikan sumber energi pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik di Mesir tersebut berada di bendungan Aswan. Pembangkit listrik tenaga air di Bendungan Aswan menghasilkan 2845 MegaWatt, tertinggi jika dibandingkan dengan pembangkit listrik di lembah Sungai Nil lainnya.²⁹ Meskipun demikian pembangkit listrik tenaga air yang dihasilkan bendungan Aswan hanya 11% dari total energi listrik yang dihasilkan oleh Negara Mesir.³⁰ Manfaat pembangkit listrik bagi Mesir adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Mesir sendiri dan merupakan penggerak industri di Mesir.

Tenaga Listrik di Hasilkan oleh Negara lembah diSungai Nil

Nama Negara	Tenaga Listrik yang dihasilkan di Lembah Sungai Nil (MW)
Burundi	40.8
Ethiopia	410
Kenya	2
R.D Kongo	23.1
Mesir	2845
Rwanda	34
Sudan *	238
Tanzania	337
Uganda	180

*termasuk Sudan Selatan

Simon.A mason. *From Conflict to Cooperation in the Nile*

²⁸Lowell.N.Lewis.*The Role of Agriculture in the Economy of Egypt*.2009 (http://www.egyptianagriculture.com/role_economics.html) diakses tanggal 5 april 2015

²⁹ Simon a mason.*op.cit.*,

³⁰ Laura Parkes. The Politics of 'Water Scarcity' in the Nile Basin: the Case of Egypt. *Journal of Politics & International Studies* vol 9 no 1 (433-480) halaman 456

Basin (Zurich: Swiss Federal Institute of Technology, 2004) halaman 106

3. kebutuhan Industri

Air juga dibutuhkan dalam sektor Industri terutama di Mesir. menurut Kementerian Air dan Irigasi Mesir, kebutuhan air untuk sektor industri mencapai 2,50 BCM/pertahun dan 0,7 diantaranya air tersebut digunakan melalui penguapan dalam proses Industri. Namun sektor industri juga memiliki dampak buruk yaitu tercemarnya air Sungai Nil di Mesir yang disebabkan oleh limbah yang berasal dari industri di Mesir.³¹ Sektor industri menyumbang 37,4% dari total GDP Mesir.³² Industri di Mesir meliputi tekstil, makanan, metal, kimia dll.

4. Pariwisata dan Transportasi

Sungai Nil merupakan salah satu jalur transportasi air di Mesir. Hal ini dikarenakan sebagian besar kota-kota Mesir berada di tepi Sungai Nil sehingga sebagian besar kota di Mesir dapat ditempuh melalui jalur air di Sungai Nil. Sungai Nil sudah dimanfaatkan sebagai jalur transportasi sejak masa peradaban Mesir kuno.

Sungai Nil juga menjadi daya tarik pariwisata di Mesir. ribuan kapal di Mesir memiliki fasilitas seperti restoran dan hotel untuk menarik minat wisatawan. Kapal-kapal tersebut di berlayar dari Bendungan Aswan hingga ke kota Kairo. Tidak kurang kapal-kapal tersebut melayani 40 ribu wisatawan perminggu³³

³¹ Ministry of Water Resources and Irrigation Egypt.*op.cit.*,

³² Laura Parkes.*op.cit.*, halaman 452.

³³ Yasser Raslan dan Rafeek Abdelbarry (http://www.researchgate.net/publication/228492481_economical_and_environmental_aspects_of_navigation_development_in_the_nile) diakses 17 mei 2015 pukul 20:17

Kepentingan Mesir Menolak Meratifikasi Cooperation Framework Agreement (CFA)

1. Kepentingan geografis dan Iklim

Faktor geografis suatu negara sangat beragam. Posisi geografis dan iklim suatu negara bisa menjadi suatu keuntungan bagi negara maupun menjadi tantangan negara tersebut. Negara akan memanfaatkan sebesar-besarnya keuntungan dari ataupun mengatasi rintangan dari dampak posisi geografis dan iklim negara tersebut. Sehingga posisi geografis dan iklim menjadi salah satu pertimbangan suatu negara dalam mengambil kebijakan dan pada kasus ini yaitu kebijakan luar negeri.

Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia dan dilintasi hingga 11 negara. Tiap negara memiliki posisi geografis serta iklim yang berbeda dengan negara lainnya. Dengan adanya perbedaan letak geografis dan iklim berpengaruh pada sikap dan kebijakan negara tersebut mengenai Sungai Nil. Mesir berada di regional Afrika Utara dan Sungai Nil mengalir dari selatan hingga utara. Sehingga karena posisi geografis Mesir tersebut, Sungai Nil di Mesir berada paling hilir. ditambah lagi sumber mata air Sungai Nil berada di luar teritorial Mesir.

Mesir memiliki prioritas yaitu menjamin Sungai Nil tetap mengalir hingga ke Mesir namun dengan kondisi berada di hilir, maka Mesir berada di posisi geografis yang tidak menguntungkan. Faktor geografis ini menjadikan Sungai Nil sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri sejak zaman Mesir Kuno hingga sekarang. Kebijakan dalam mempertahankan Sungai Nil oleh Mesir dilakukan baik dengan ekspansi wilayah ke daerah yang diduga menjadi sumber air Sungai Nil hingga mengadakan perjanjian dengan negara lembah Sungai Nil lainnya.

Cooperation Framework Agreement (CFA) merupakan perjanjian pertama yang hampir melibatkan seluruh

negara lembah Sungai Nil yang menjadi anggota *Nile Basin Initiative* (NBI). Namun Mesir keberatan dengan kesepakatan tersebut terutama pada pasal 14b yang ada di dalam CFA sehingga Mesir menolak untuk meratifikasi.

Salah satu faktor Mesir dalam mengeluarkan kebijakan menolak untuk meratifikasi CFA adalah didasarkan fakta bahwa Mesir berada di hilir Sungai Nil. dilihat dari isi pada pasal 14 yaitu tiap pemanfaatan serta pengembangan Sungai Nil tidak boleh berdampak signifikan terhadap negara lain. Mesir mengkhawatirkan adanya proyek-proyek pemanfaatan Sungai Nil yang dilakukan oleh negara lembah Sungai Nil terutama di lembah hulu Sungai Nil. Karena hal itu berdampak pada aliran Sungai Nil yang mengalir ke Mesir. Adanya kesepakatan CFA menjadikan sebagai legitimasi negara-negara lembah Sungai Nil untuk membangun proyek-proyek Sungai Nil seperti bendungan, irigasi dll yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada aliran hilir Sungai Nil. Dengan kata lain kesepakatan CFA dipandang akan menguntungkan bagi Negara yang posisi geografisnya berada di hulu Sungai Nil, namun dirasakan merugikan bagi negara yang berada di hilir Sungai Nil seperti Mesir.

Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia memiliki beragam iklim yang berbeda pula. Pada umumnya iklim di negara lembah hulu Sungai Nil yang berada di selatan merupakan iklim hujan tropis namun di hilir Sungai Nil yang berada di utara memiliki iklim gurun. Iklim gurun memiliki ciri dimana saat siang hari memiliki suhu yang tinggi sedangkan pada malam hari memiliki suhu yang rendah. Iklim gurun juga bercirikan memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Berbeda dengan iklim hujan tropis yang biasanya memiliki jumlah curah hujan yang begitu besar. Mesir yang memiliki iklim gurun memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Dengan jumlah curah hujan 0-120 mm maka Mesir

memiliki curah hujan yang paling sedikit jika dibandingkan dengan negara lembah Sungai Nil lainnya. Hal ini menjadikan Sungai Nil sebagai sumber yang air utama bagi penduduk Mesir dimana 95% sumber air Mesir berada di Sungai Nil. Hal ini menjadikan negara Mesir menjadi negara yang paling bergantung dengan Sungai Nil jika dibandingkan dengan negara lembah Sungai Nil lainnya.

Fakta iklim Mesir menunjukkan bahwa Mesir berada di posisi yang rentan karena memiliki curah hujan yang rendah sehingga bergantung pada air di Sungai Nil. Mesir mengkhawatirkan akan adanya proyek yang dibangun oleh negara-negara lembah Sungai Nil setelah dirumuskannya CFA yang berdampak pada aliran air Sungai Nil di Mesir. Sehingga CFA dipandang tidak menguntungkan bagi Mesir.

1.

2. Kepentingan Politik

a. Berlawanan dengan Hak Historis Mesir atas Sungai Nil.

Hak historis adalah hak yang diberikan karena adanya faktor kejadian masa lampau. Hak historis Mesir atas Sungai Ni memegang hegemoni serta memiliki hak veto atas tiap pembangunan proyek Sungai Nil. Hak tersebut diperoleh sejak Mesir masih dibawah kolonial Inggris.

Pada masa kolonial, Mesir sempat dijajah oleh Inggris. Niat awal Inggris menjajah Mesir adalah tertarik dengan Terusan Suez. Terusan Suez sangat strategis bagi perdagangan dan pelayaran internasional hingga saat ini. Inggris mulai menyadari kekayaan yang akan dihasilkan dari Sungai Nil. Inggris beriat membangun perkebunan kapas di Mesir karena saat itu kapas adalah salah satu komoditas ekspor utama. Untuk menjamin agar Sungai Nil tetap mengalir hingga ke Mesir, Inggris melakukan ekspansi wilayah hingga ke daerah lembah hulu Sungai Nil meliputi wilayah Sudan, Uganda, Kenya dan

Tanzania. Meski demikian, beberapa daerah lembah Sungai Nil lainnya tidak dijajah Inggris dan sebagian besar dijajah oleh negara Eropa lainnya.

Inggris pun mengadakan perjanjian dengan penjajah Eropa yang menguasai lembah Sungai Nil seperti Italia dan Belgia. Dari perjanjian tersebut, Italia dan Belgia menjamin bahwa tidak akan ada pembangunan proyek di Sungai Nil yang akan mengganggu aliran Sungai Nil di Mesir. Maka dengan wilayah lembah Sungai Nil yang dijajah Inggris serta perjanjian dengan penjajah Italia dan Belgia membuat Inggris memegang hegemoni di seluruh Sungai Nil.

Pada tahun 1922, Mesir memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Inggris pun mengadakan perjanjian dengan Mesir terkait Sungai Nil. Pada perjanjian tersebut Inggris menjamin tidak akan membangun proyek yang akan mengancam aliran Sungai Nil di Mesir. Perjanjian tersebut mengikat bagi daerah penjajahan Inggris saat itu yang meliputi Sudan, Tanzania, Uganda dan Kenya. Ditambah lagi perjanjian Inggris dengan penjajah Eropa lain yang memiliki jajahan di wilayah lembah Sungai Nil masih berlaku pada saat itu. Hal ini menjadikan Mesir dan Inggris memegang hegemoni di seluruh Sungai Nil.

Pada tahun 1959 Sudan yang saat itu menjadi negara independen meminta untuk memperbarui perjanjian Mesir-Inggris yang dibuat tahun 1929. Perjanjian tersebut sangat menguntungkan Mesir dan Sudan karena kedua negara menguasai hampir seluruh aliran Sungai Nil. Ditambah lagi Mesir dan Sudan memiliki hak veto terhadap proyek yang dibangun di seluruh Sungai Nil. Hak inilah yang merupakan hak historis Mesir atas Sungai Nil. Hal ini dikarenakan dampak dari perjanjian Inggris-Mesir ditambah lagi sebagian besar negara lembah Sungai Nil masih dijajah bangsa Eropa saat itu dan perjanjian tersebut tetap berlaku meski

negara-negara lembah Sungai Nil berdaulat.

Selama pemberlakuan perjanjian 1929 dan perjanjian 1959, negara lembah Sungai Nil diwajibkan melapor tiap rencana pembangunan proyek pemanfaatan Sungai Nil terhadap Mesir dan Sudan, dan kedua negara tersebut berhak memveto proyek yang dinilai akan mengancam aliran air Sungai Nil. Ditambah lagi Mesir memperoleh 55.5 milyar kubik pasokan air dari perjanjian Mesir-Sudan tahun 1959. Karena ketidakpuasan atas perjanjian Mesir-Inggris dan Mesir-Sudan membuat negara lembah Sungai Nil menegosiasikan suatu aturan yang baru yang menggantikan kedua perjanjian tersebut. Kesepakatan CFA dibentuk untuk menggantikan perjanjian Mesir-Inggris tahun 1929 dan Perjanjian Mesir-Sudan tahun 1959 yang dinilai memberatkan bagi negara lembah Sungai Nil lainnya. Sehingga diharapkan adanya perjanjian baru yang disepakati seluruh negara lembah Sungai Nil. Namun kesepakatan CFA ditolak oleh Mesir.

Kesepakatan CFA tidak lagi memberikan Mesir atas hak historis yang sebelumnya diperoleh dari perjanjian Inggris dan Sudan. Sehingga Mesir tidak lagi memiliki hak veto terhadap perencanaan pembangunan Proyek yang dilakukan negara lembah Sungai Nil. Ditambah lagi, NBI akan membentuk komisi di NBI yang mengelola Sungai Nil dan menjamin alokasi pasokan air di Sungai Nil.³⁴ Komisi permanen tersebut mengganti posisi Mesir bersama Sudan yang sebelumnya memperoleh hak historis atas Sungai Nil. Sehingga dengan adanya CFA, Mesir tidak lagi memiliki hak historis yang diperoleh sejak zaman kolonial.

³⁴ *Nile River Countries Consider Cooperative Framework Agreement*. 17 maret 2011 (<http://www.voanews.com/content/nile-series-overview-11march11-118252974/157711.html>) diakses tanggal 14 mei 2015. Pukul 23 :09

b. Tidak Sesuai dengan Konstitusi Mesir

Presiden Mesir Jenderal Fatah Al Sisi memerintahkan untuk amandemen konstitusi Mesir pada tahun 2014. Amandemen tersebut dilakukan untuk menghapus amandemen konstitusi tahun 2012 yang merupakan peninggalan presiden Mohammad Morsi yang digulingkan tahun 2013. Konstitusi Mesir tahun 2014 memperkuat kekuatan 3 lembaga utama yaitu militer, kepolisian dan kejaksaan. Konstitusi ini juga memberikan lebih banyak hak perempuan dan orang cacat serta menghilangkan haluan Islam yang ditambahkan pada masa pemerintahan Morsi tanpa menghilangkan prinsip syariah Islam sebagai sumber utama undang-undang.³⁵

Konstitusi Mesir terbaru juga menyinggung soal Sungai Nil pada pasal 44. Isi pasal 44 dalam konstitusi Mesir tahun 2014 yaitu : “

The state commits to protecting the Nile River, maintaining Egypt's historic rights thereto, rationalizing and maximizing its benefits, not wasting its water or polluting it. The state commits to protecting its mineral water, to adopting methods appropriate to achieve water safety, and to supporting scientific research in this field. Every citizen has the right to enjoy the Nile River. It is prohibited to encroach upon it or to harm the river environment. The state guarantees to remove encroachments thereon. The foregoing is regulated by law.

Pada pasal 44 tersebut menunjukkan bahwa Mesir akan melindungi dan memanfaatkan Sungai Nil dan mempertahankan hak historis Mesir atas Sungai Nil.

³⁵ Egypt's New Constitution gets 98% 'yes' vote. 18 Januari 2014 (<http://www.theguardian.com/world/2014/jan/18/egypt-constitution-yes-vote-mohamed-morsi>) diakses tanggal 15 Mei 2015. Pukul 20: 36

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa dalam aturan CFA akan dibentuk komisi permanen yang berfungsi menjamin dan mempertahankan alokasi air Sungai Nil. Sehingga komisi permanen tersebut menggantikan posisi Mesir dengan hak historis yang diperoleh dari perjanjian Inggris-Mesir 1929 dan Mesir-Sudan 1959. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan CFA berlawanan dengan isi konstitusi Mesir dan akan membuat Mesir sulit untuk meratifikasi CFA

3. Kepentingan Ekonomi

a. Ketergantungan Perekonomian Mesir terhadap Sungai Nil

Sejak ribuan tahun yang lalu, Sungai Nil merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada kehidupan masyarakat Mesir. Hal ini dikarenakan sebagian besar daratan Mesir sebagian besar hanyalah gurun yang tandus dengan curah hujan yang sangat kecil. Sehingga Sungai Nil menjadi sumber air utama bagi rakyat Mesir, tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari, perekonomian Mesir sangat bergantung pada aliran Sungai Nil.

Melihat dari data tabel 2.5, 85% dari total seluruh penduduk Mesir berada di Sungai Nil. Sehingga Mesir memiliki penduduk yang bermukim di lembah Sungai Nil terbesar diantara negara lembah Sungai Nil lainnya. Kota-kota besar di Mesir sebagian besar berada di tepi Sungai Nil. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa Sungai Nil merupakan urat nadi perekonomian Mesir.

Sungai Nil juga merupakan sumber irigasi utama untuk pertanian Mesir. Jika dibandingkan dengan negara lembah Sungai Nil lainnya, Mesir memiliki lahan pertanian terluas yang berada di lembah Sungai Nil. Faktor tersebut dikarenakan karena Sungai Nil merupakan sumber air utama Mesir. Berbeda dengan negara lembah Sungai Nil lainnya yang memiliki sumber air lain yang melimpah. Pertanian

bagi Mesir tidak hanya untuk kebutuhan pangan penduduk Mesir namun juga berkontribusi pada perekonomian Mesir. Pertanian menyumbang 14% dari total GDP Mesir dan 23% dari total penduduk Mesir bekerja di bidang pertanian .

Sungai Nil di Mesir juga digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Tenaga listrik sangat bermanfaat bagi perekonomian Mesir dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Mesir. Menurut data pada tabel 2.5 tenaga listrik yang dihasilkan Mesir paling besar diantara negara lembah Sungai Nil lainnya yaitu menghasilkan 2845 megawatt. Sedangkan negara lembah Sungai Nil tidak membangun pembangkit listrik tenaga air di Sungai Nil sebesar negara Mesir.

Air Sungai Nil juga dibutuhkan dalam sektor Industri di Mesir. Sumber air untuk kebutuhan industri sebagian besar berasal dari Sungai Nil. Kebutuhan air untuk sektor industri mencapai 2,50 BCM/pertahun dan 0,7 diantaranya air tersebut digunakan melalui penguapan dalam proses Industri Sektor industri menyumbang 37.4% dari total GDP Mesir. Dan Sungai Nil juga dimanfaatkan untuk sektor pariwisata Mesir dan transportasi. Peninggalan peradaban Mesir kuno mengundang kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Transportasi air Sungai Nil digunakan untuk mengunjungi sisa-sisa peradaban Mesir kuno yang sebagian besar berada di lembah Sungai Nil. Tidak hanya transportasi, Sungai Nil menjadi objek wisata. Terdapat ribuan hotel berbentuk kapal yang berada di Sungai Nil. jika dibandingkan dengan negara lembah Sungai Nil lainnya. Pemanfaatan Sungai Nil untuk industri dan pariwisata oleh negara lembah Sungai Nil lainnya tidak sebesar Mesir.

Dengan demikian, ketergantungan perekonomian Mesir terhadap Sungai Nil lebih paling tinggi jika dibandingkan dengan ketergantungan negara lembah

Sungai Nil lainnya. Namun ini juga membuktikan bahwa Mesir adalah negara yang paling berhasil dalam memanfaatkan Sungai Nil dibanding dengan negara lembah Sungai Nil lainnya.

Jika kita lihat dari latar belakang pembentukan organisasi NBI dan kesepakatan CFA, Negara lembah Sungai Nil selain Mesir mulai melihat potensi Sungai Nil yang diharapkan dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan rakyat negara lembah Sungai Nil. Karena sebagian besar negara lembah Sungai Nil memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah.

Kesepakatan CFA akan menjadi dasar negara lembah Sungai Nil terutama di negara di hulu Sungai Nil akan membangun proyek pemanfaatan Sungai Nil namun. Hal ini menjadi suatu ancaman bagi Mesir karena tiap proyek pembangunan Sungai Nil akan mengancam aliran Sungai Nil yang mengalir ke Mesir. Ditambah lagi, Mesir tidak lagi memperoleh hak veto seperti sebelumnya, posisi tersebut digantikan oleh komisi permanen.

Komisi permanen NBI dianggap Mesir tidak mempertimbangkan Mesir sebagai negara hilir. Hal ini terlihat dari pembangunan bendungan *Grand Ethiopia Renaissance Dam* (GERD) yang disebut akan menjadi bendungan terbesar di Afrika di Ethiopia.³⁶ Bendungan tersebut dikhawatirkan akan berdampak besar pada aliran Sungai Nil di Mesir. Hal ini dikarenakan 80% Sungai Nil di Mesir berada di Ethiopia.

Ethiopia menolak untuk memberitahukan pembangunan proyek Sungai Nil ke negara lembah Sungai Nil lainnya karena bagi Ethiopia hal itu akan tidak sesuai dengan isi kesepakatan CFA dan justru merupakan bentuk pengakuan perjanjian yang dibuat pada zaman

³⁶ Ethiopia Ratifies River Nile Treaty Amid Egypt Tension. 13 juni 2013(<http://www.bbc.com/news/world-africa-22894294>) diakses tanggal 17 Mei 2015. Pukul 20:23

kolonial.³⁷ Menurut isi CFA, tiap pembangunan proyek Sungai Nil hanya dilaporkan ke komisi CFA yang memiliki tugas mengawas dan menjamin air Sungai Nil. Pembangunan GERD bagi Ethiopia sudah dilaporkan ke komisi CFA. Mesir melihat bahwa komisi CFA tidak memperhatikan kepentingan Mesir yang merasa bendungan GERD akan berdampak serius pada aliran Sungai Nil di Mesir. proyek-proyek Sungai Nil seperti GERD akan berdampak serius pada perekonomian Mesir yang sangat bergantung pada Sungai Nil dan kesepakatan CFA tidak membantu Mesir dalam mengamankan kepentingan Ekonomi Mesir di Sungai Nil.

4. Kepentingan Keamanan

a. Keamanan Air

Ketergantungan Mesir terhadap Sungai Nil tidak hanya mengenai ekonomi saja namun juga menyangkut soal keamanan. Mesir adalah negara paling kering diantara negara lembah Sungai Nil lainnya. Hal ini menjadikan Mesir menjadikan air Sungai Nil sebagai Sumber utama. Dimana 95% sumber air bersih untuk kebutuhan warga Mesir berasal dari Sungai Nil. Misalnya untuk kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, mandi bahkan untuk air minum. 97% sumber air untuk kebutuhan rumah tangga Mesir berasal dari Sungai Nil. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab penduduk Mesir bermukim di sekitar Sungai Nil. Pertumbuhan penduduk Mesir begitu pesat dari 22 juta pada tahun 1950 ke 85 juta pada tahun 2010. Diperkirakan penduduk Mesir akan mencapai 120-150 juta pada tahun 2050. Dengan demikian, Mesir sendiri diramalkan akan mengalami kelangkaan air pada seiring bertambahnya penduduk Mesir yang diramalkan hanya memiliki persediaan 500 m³/pertahun yang mana dibawah standar

minimum PBB yaitu 1000m³/pertahun.³⁸ Dengan kata lain, Mesir akan mengalami masa krisis air saat warga Mesir mengalami peningkatan dan Air Sungai Nil mengalami kekurangan. Itulah alasan Sungai Nil bagi Mesir merupakan isu keamanan karena menyangkut hidup sebagian besar warga negaranya.

Berbeda dengan Mesir, negara di lembah hulu Sungai Nil tidak begitu bergantung terhadap Sungai Nil. Hal ini dikarenakan pada umumnya negara di hulu lembah Sungai Nil adalah negara tropis, berbeda dengan Mesir yang beriklim gurun. Negara tropis memiliki ciri curah hujan yang besar jika dibandingkan dengan negara iklim gurun. Hal ini membuat negara-negara tersebut tidak begitu bergantung pada air Sungai Nil. Ditambah lagi, pada umumnya negara di hulu lembah Sungai Nil, masih memiliki sumber air tawar lain selain Sungai Nil. Berbeda dengan Mesir yang menjadikan Sungai Nil sebagai sumber air tawar yang paling utama.

Kesepakatan CFA bagi Mesir tidak memberikan keuntungan dalam menghadapi isu keamanan air mengancam Mesir. Justru sebaliknya, Mesir melihat CFA akan mengancam keamanan air. Penyebabnya yaitu :

Pertama, CFA akan menjadi dasar negara negara terutama di hulu lembah Sungai Nil untuk membangun proyek-proyek pemanfaatan Sungai Nil demi kesejahteraan rakyatnya. Mesir mengkhawatirkan proyek pemanfaatan Sungai Nil akan berdampak langsung pada aliran Sungai Nil di Mesir seperti proyek bendungan raksasa *Grand Ethiopia Renaissance Dam* (GERD). Proyek tersebut akan berdampak serius pada keamanan air dan dikhawatirkan akan membuat Mesir mengalami krisis air.

Kedua, CFA tidak mengakui hak historis Mesir yang diperoleh sejak zaman kolonial Inggris. Sebelumnya Mesir

³⁷ Salman M.A Salman The Nile Basin Cooperative Framework Agreement: A Peacefully Unfolding African Spring ?, *Water Internasional* Vol 38 no 1 (2013) 17-29 halaman 25

³⁸ Ministry of Water Resources and Irrigation Egypt. *Water Scarcity*. Op.cit.,

memperoleh hak istimewa karena berada di hilir Sungai Nil. Hak istimewa tersebut antara lain memperoleh 55.5 milyar kubik air. Kesepakatan CFA menggantikan kesepakatan yang dibuat pada masa kolonial otomatis menggugurkan hak istimewa tersebut terhadap Mesir. Dengan adanya kesepakatan CFA, maka negara-negara lembah hulu Sungai Nil tidak menjamin akan memberikan Mesir pasokan air sesuai yang diinginkan Mesir. Ketiga, CFA membentuk komisi NBI yang berfungsi mengawasi proyek-proyek Sungai Nil agar tidak berdampak pada negara lembah Sungai Nil lainnya. Namun CFA tidak mewajibkan negara untuk memberitahukan pada negara lembah Sungai Nil lain secara langsung. Mesir tidak mempercayakan persoalan keamanan airnya pada komisi NBI, karena bagaimanapun negara Mesir harus punya andil dalam mempertahankan kepentingan keamanan dan bertanggung jawab atas keamanan negara Mesir sendiri, bukan melalui pihak luar seperti komisi di NBI.

Dengan tidak meratifikasinya kesepakatan CFA, Mesir menganggap bahwa kesepakatan CFA tidak mengikat bagi Mesir dan Mesir tidak setuju tiap pembangunan proyek Sungai Nil meski proyek tersebut disetujui oleh komisi di NBI. Jika Mesir meratifikasi kesepakatan CFA, maka akan dianggap menyetujui proyek Sungai Nil meski hal tersebut berdampak pada aliran air di Sungai Nil.

Penutup

Kepentingan Mesir menolak meratifikasi CFA adalah karena Mesir merasa tidak diuntungkan dan merugikan pada kesepakatan tersebut. Pertama dari kondisi dan posisi geografis, Mesir adalah negara dengan iklim gurun yang kering yang memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Sehingga Mesir hanya menggunakan air tawar yang berasal dari Sungai Nil. Mesir mengkhawatirkan akan adanya proyek-proyek Sungai Nil di hulu Sungai Nil yang dapat mengancam aliran air Sungai Nil di Mesir. Kepentingan

kedua Mesir menolak meratifikasi CFA yaitu, CFA tidak mengakui hak historis Mesir atas Sungai Nil. Hak historis Sungai Nil yaitu Mesir memperoleh 55,4 milyar kubik air dari Sungai Nil serta hak veto terhadap proyek Sungai Nil. Selain itu kesepakatan CFA dipandang Mesir tidak sesuai dengan konstitusi Mesir yang mengakui hak historis atas Sungai Nil. Kepentingan Ketiga yaitu dari segi Ekonomi, perekonomian Mesir sangat bergantung pada Sungai Nil seperti di bidang, pertanian, industri, negeri listrik serta pariwisata. Berbeda dengan negara lembah Sungai Nil lainnya yang tidak bergantung pada Sungai Nil. Kepentingan keempat yaitu Sungai Nil merupakan isu keamanan bagi Mesir. Karena Sungai Nil menjadi sumber air tawar utama bagi warga Mesir. Mesir khawatir kesepakatan CFA akan mengancam keamanan bagi warga negara Mesir. Dengan tidak meratifikasi CFA, Mesir tidak setuju atas kesepakatan CFA dan menolak terikat pada kesepakatan CFA.

Daftar Pustaka

Swain, Ashok. Ethiopia, Sudan, and Egypt: The Nile River Dispute. *Journal of Modern African Studies* 53 (4) (1997) 675-694.

Lumumba, Otieno, L. *Pthei nterpretation of the 1929 Treaty and its legal relevance and implication for the stability of the region*

(www.codesria.org/IMG/pdf/03_Lumumba.pdf) halaman 13. Diakses tanggal 17 oktober 2014 Pukul 19:10

Andrew Carlson. *Who Own The Nile ? Egypt, Sudan And Ethiopia Changin Dam*. 29 september 2013

(<http://origins.osu.edu/article/who-owns-nile-egypt-sudan-and-ethiopia-s-history-changing-dam>) diakses tanggal 17 oktober 2014. Pukul 19:20

Kagwanja, Peter . Calming The Waters : The East African Community Conflict Over The Nile Resources. *Journal Of Eastern African Studies*. 1 (3) (2007) 321-337.

Jackson, Robert & Sorensen, Georg. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Perwita, Anak Agung Banyu., Yani, Mochamad. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tvedt, Terje .2010 *The River Nile In The Post Colonial Age*. London : I.B Tauris.

Entebbe Agreement not binding on Egypt: Minister of irrigation. 16 Juni 2013. (<http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/74134/Egypt/Politics-/Entebbe-Agreement-not-binding-on-Egypt-Minister-of.aspx>) diakses tanggal 24 oktober 2014 pukul 20:43

We are committed to 1959 Nile water sharing agreement: Egyptian and Sudanese official". 21 Februari 2014 (<http://www.dailynewsegypt.com/2014/02/21/committed-1959-nile-water-sharing-agreement-egyptian-sudanese-officials/>) diakses tanggal 25 oktober 2014.

Egypt warns Ethiopia over Nile dam. 11 Juni 2013. (www.aljazeera.com/news/africa/2013/06/201361144413214749.html) diakses tanggal 25 oktober 2014.

Hassan, A Handy dan Ahmad Al Rasheedy. The Nile River and Egyptian Foreign Policy Interests. *African Sociological Review*. 11 (1) (2007) (25-37)

Parkes, Laura . The Politics of 'Water Scarcity' in the Nile Basin: the Case of

Egypt. Journal of Politics & International Studies 9 (1) (2013) (433-480)

Yasser Raslan dan Rafeek Abdelbarry Economical And Environmental Aspects Of Navigation Development In The Nile (http://www.researchgate.net/publication/228492481_economical_and_environmental_aspects_of_navigation_development_in_the_nile) diakses 17 mei 2015 pukul 20:17

Olivia, Yessi. Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan . *Transnasional* 5 (1) (2013) 890-907

Ministry of Water Resources and Irrigation Egypt. *Water Scarcity*. (www.mfa.gov.eg/SiteCollectionDocuments/Egypt%20Water%20Resources%20Paper_2014.pdf) diakses tanggal 19 mei 2015. Pukul 22:13

Nile River Countries Consider Cooperative Framework Agreement. 17 maret 2011 (<http://www.voanews.com/content/nile-series-overview-11march11-118252974/157711.html>) diakses tanggal 14 mei 2015. Pukul 23 :09

Egypt's New Constitution gets 98% 'yes' vote. 18 januari 2014 (<http://www.theguardian.com/world/2014/jan/18/egypt-constitution-yes-vote-mohamed-morsi>) diakses tanggal 15 mei 2015. Pukul 20: 36

Salman M.A Salman The Nile Basin Cooperative Framework Agreement: A Peacefully Unfolding African Spring ?, *Water Internasional* Vol 38 no 1 (2013) 17-29